



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor XXX, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti *a quo* di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 6 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 907/85/VII/2002, tertanggal 8 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar selama 13 tahun 3 bulan;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama: 1. XXX, umur 14 tahun, 2. XXX, umur 11 tahun, 3. XXX, umur 9 tahun, 4. XXX, umur 6 tahun, keempat anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada akhir tahun 2011, Termohon menghubungi Pemohon pada saat Termohon berada di rumah orang tua Termohon di XXX agar Pemohon ke XXX, sesampainya Pemohon di XXX, Termohon di hadapan Pemohon beserta keluarga Termohon mengakui jika Termohon telah berhubungan asmara dengan lelaki lain di Pinrang dan Pemohon hanya diam saja karena menahan emosi dan setelah Termohon mengaku atas perbuatannya, Pemohon mengajak Termohon ke XXX ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau tetapi atas desakan keluarga Termohon akhirnya Termohon ikut bersama dengan Pemohon ke XXX di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa tiga bulan setelah kejadian tersebut, Termohon pikirannya sudah mulai tidak stabil dan tidak nyambung kalau diajak komunikasi berjalan seiring waktu Termohon sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, sehingga Pemohon membawa Termohon ke rumah sakit Jiwa dan diberikan obat oleh dokter, namun kesehatan Termohon tetap saja tidak ada perubahan apalagi Pemohon juga membawa Termohon untuk berobat secara alternatif masih saja tetap juga tidak ada perubahan serta keluarga Termohon juga sama sekali tidak ada yang datang menjenguk ataupun membantu Pemohon untuk merawat Termohon;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak bisa disembuhkan apalagi Termohon juga sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan orang tua Termohon menerima alasan Pemohon untuk mengembalikannya Termohon apalagi orang tua Termohon juga sudah malu atas kejadian yang telah diperbuat oleh Termohon yaitu telah berhubungan asmara dengan lelaki lain;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 5 September 2017 dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang isi berita acara relaas tersebut menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas, selanjutnya dilakukan kembali pemanggilan kepada Tergugat pada tanggal 27 September 2017 pada alamat baru Tergugat, ternyata Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 907/85/VII/2002, tertanggal 8 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Telekomunikasi, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pada awal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu masalah anak dan masalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga terjadi perpisahan tempat tinggal disebabkan karena Termohon yang mengalami kelainan jiwa;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu tinggal bersama di Polewali;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengobati Termohon namun tidak berhasil dan Termohon tidak sembuh dari penyakitnya sehingga Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXX, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar; Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada awalnya karena masalah anak dan masalah penghasilan yang tidak

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



mencukupi kebutuhan hidup, kemudian Termohon mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih sewaktu tinggal bersama di Polewali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon namun tidak berhasil dan Termohon tidak sembuh dari penyakitnya sehingga Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal pada akhir Tahun 2011 yang mana Termohon menghubungi Pemohon agar datang ke XXX di rumah orang tua Termohon dan saat kedatangan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan di hadapan Pemohon dan orang tua Termohon bahwa dirinya telah berhubungan asmara dengan seorang lelaki yang asalnya dari Pinrang dan setelah kejadian itu Pemohon membawa pulang Termohon ke Polewali dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Termohon mulai mengalami gangguan pikiran dan jika diajak berkomunikasi tidak nyambung, akhirnya Pemohon membawa Termohon ke rumah sakit jiwa namun Termohon tetap tidak ada perubahan, hingga pada bulan Oktober 2015 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saat itu juga Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuanya dan sejak saat itu terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Menyadari hal tersebut Pemohon berkesimpulan sudah tidak harapan lagi untuk tetap hidup bersama Termohon dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karena ketidakhadiran Termohon tersebut maka perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berawal dari masalah anak dan masalah tidak cukupnya penghasilan Pemohon untuk kebutuhan hidup dan terakhir masalah Termohon yang mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surah Al Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّا لَلْهَامِمْ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika salah satu pihak mendapat cacat badan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri** dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota XXX, Provinsi Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratusan enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 561.000,00

(lima ratusan enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)